

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 2, No. 2 Desember 2019
DOI: 10.31314/jsap.2.2.121-127.2019

EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR DALAMMENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO

Riswan Abjul[1], Joice Machmud[2], Sri Hantuti Paramata[3]
1, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2,3, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; iswanabjul17@gmail.com, joicemachmud@umgo.ac.id, tutiparamata@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima: 13 Oktober 2019, Disetujui: 23 November 2019, Publish 15 Desember 2019

Abstract:
The objective of this research is to describe the effectiveness of market retribution in increasing original local government revenue of Gorontalo Regency. This research is quantitative research which guided by the data provided by the relevant office. The scope of this research includes the amount of original local government revenue and amount of market retribution received at Gorontalo regency in 2013 until 2017. The result showed effectiveness of market retribution on orginal local government revenue in 2013 are 135%, in 2014 are 105,22%, in 2015 are 82,51%, in 2016 are 89,93%, and 2017 are 71,63%. Based on effectiveness criteria that used showed market retribution is classsifiet as effective. But has not been able to give a significant influence on original local government revenue at Gorontalo regency, because number of targets and realization of market retribution that set by government decreases every years.

Keywords: *Original Local Government Revenue, Market retribution*

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektifitas retribusi pasar dalam meningkatkan PAD kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berpendoman pada data yang tetah disediakan pada kantor terkait. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi jumlah pendapatan asli daerah dan jumlah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu 2013-2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektifitas retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2013 sebesar 135%, pada tahun 2014 sebesar 105,22%, pada tahun 2015 sebesar 82,51%, pada tahun 2016 sebesar 89,93% dan pada tahun 2017 sebesar 71,63%. Berdasarkan kriteriaefektifitas yang digunakan, menunjukkan bahwa realisasi retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo tergolong efektif. Namun belum mampu memberikan pengaruh yang signifikkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo, hal ini dikarena jumlah target dan realiasi retribusi pasar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan di setiaptahunnya..

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retibusi Pasar

PENDAHULUAN

Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan

otonomi daerah sesuai dengan penerapannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan. Keuangan Pusat dan Daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang- undangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip perundangan otonomi daerah pemerintahan daerah, maupun keuangan daerah terutama demi terciptanya efektivitas dan efisiensi di daerah (Panggulu, 2013).

PendapatanAsli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sector pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana bahwa pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang atau badan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan pengertian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah daerah atau pembayara ntersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan.

Di Kabupaten Gorontalo terdapat 7 pasar INPRES atau pasar Intruksi Presiden yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah di kabupaten gorontalo. Pasar tersebut yaitu : Pasar Inpres Kayubulan yang berada di kecamatan Limboto, Pasar Inpres Hulawa yang berada di kecamatan Telaga, Pasar Inpres Yosonegoro yang berada di kecamatan Limboto Barat, Pasar Inpres Yosonegoro yang berada di kecamatan Limboto Barat, Pasar Inpres Kaliyoso yang berada di kecamatan Dungaliyo, Pasar Inpres Datahu yang berada di kecamatan Tibawa, Pasar Inpres Pulubala yang berada di kecamatan Pulubala, Pasar Inpres Sidumulyo yang berada di kecamatan Boliyohuto.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan

rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional, dinyatakan bahwa retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yakni retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan. Untuk retribusi jasa umum diantaranya adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelataran parkir dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitianini yang berdasarkan masalah yang diangkat menjadi tempat penelitian adalah Dinas Perindustrian dan Perdaganan Kabupaten Gorontalo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo dan Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berpendoman pada data yang tetah disediakan pada kantor terkait. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi jumlah penerimaan retribusi daerah dan jumlah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu 2013-2017 (Widarjono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PerkembanganRetribusi Pasar di Kabupaten Gorontalo

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusikios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Perkembangan retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel1 berikut

Tabel1. Target Dan Realisasi Pendapatan Realisasi Penerimaan Retribusi pasar Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 – 2018.

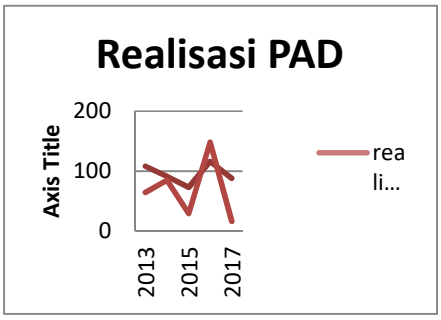
Tahun	Realisasi (%)	Pertumbuhan (%)
2013	100,68	64,97
2014	91,92	85,83
2015	75,30	29,84
2016	116,28	148,126
2017	88,96	16,57

Sumber : DPKKD Kabupaten Gorontalo

(2018)

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa realisasi retbusi pasar di Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan yang signifikkan. Tahun 2013 realisasi retibusi pasar di Kabupaten Gorontalo sebesar 100,68%. Jumlah ini turun di tahun 2014 di tahun 2015 menjadi 91,92% dan 75,30%. Naik di tahun 2016 menjadi 116% . Kemudian jumlah terus menurun di tahun 2017 dimana realisasi retibusi pasar di Kabupaten Gorontalo tercatat sebesar 16,57%.

Grafik 1. Realisasi PAD



Penurunan ini disebabkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo sering mengalami hambatan seperti kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi. Oleh karena itu peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar dan mencapai target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya mak in besar .

PerkembanganPendapatanAsli Daerah di Kabupaten Gorontalo

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya adalah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugast ersebut di atas, atau prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai pembina kestabil ansosial, politik, ekonomi, dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pada saat ini titik berat pemeberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di samping sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat di daerahnya. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karenaitu, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara

lain dengan optimalisasi penggalian dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan PAD merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga PAD terutama di Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Upaya dalam peningkatan di Kabupaten Gorontalo belum mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan. Kabupaten Gorontalo masih mengalami fluktuasi di setiap tahunnya yang selanjutnya diperlihatkan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah PAD yang masuk dari retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi (Rp)
2013	60.109.992.595.44
2014	92.805.878.218.61
2015	110.277.706.460.69
2016	117.737.654.943.28
2017	186.529.711.427.99

Sumber : DPKKD Kabupaten Gorontalo (2018)

EfektifitasPenerimaanRetribusi Pasar di Kabupaten Gorontalo

Tingkat efektifitas retibusi pasar di Kabupaten Gorontalo dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target retribusi pasar. Apabila perhitungan efektifitas retribusi pasar menghasilkan persentase mendekati 100 persen maka sudah efektif atau jika melebihi 100 persen, maka retibusi pasar semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan retibusi pasar di Kabupaten Gorontalo semakin baik. Tingkat efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel3. Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2013	60.109.992.595.44	813.409.000	135%	SangatEfektif
2014	92.805.878.218.61	976.504.000	105,22%	SangatEfektif
2015	110.277.706.460.69	909.919.500	82,51%	CukupEfektif
2016	117.737.654.943.28	1.058.793.350	89,93%	CukutEfektif
2017	186.529.711.427.99	1.336.057.875	71,63%	CukupEfektif

Sumber : DPKKD Kabupaten Gorontalo (2018)

Berdasarkan Tabel3 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo sangat efektif dimana pada tahun 2013 tingkat efektifitas mencapai 100 persen, tingkat efektifitas ini turun drastis ditahun 2018 menjadi 45 persen penurunan ini disebabkan oleh peningkatan target yang semula Rp 748.432 .000 meningkat menjadi Rp 1.509.716.950.

Efektifitas ini dapat dihitung dengan mengunakan rumus sebagai berikut :

Efektivitas= $\frac{Realisasi\ retribusi\ pasar}{Pendapatan\ asli\ daerah}$ **x 100%**

Berdasarkan kriteria efektifitas yang digunakan, menunjukkan bahwa realisasi retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo tergolong sangat efektif. Namun belum mampu memberikan pengaruh yang signifikkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo, hal ini dikarenakan jumlah target dan realiasi retribusi pasar yang ditetapkan oleh

pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan di setiaptahunnya. Penurunan target tersebut sangat berdampak pada realiasi, pada akhirnya kontribusi terhadap PAD dari retribusi pasar sangat kecil.

Ini sejalan dengan penlitian yang dilakukan Hadryan Putra Kurniawan Akbar (2010) berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa perkembangan retribusi pasar di Surakarta selama periode 2006-2010 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun hingga tahun 2010 penurunan ini disebabkan oleh penurunan target yang di tetapkan oleh pemerintah kota Surakarta, namun jika dilihat dari tingkat efektifitas retribusi pasar di Surakarta masuk dalam kategori efektif dengan rata-rata tingkat efektifitas yaitu 96,11persen per tahun. Penerimaan retribusi daerah Surakarta selama periode 2006-2010 secara keseluruhan tergolong menurun, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar belum mampu meningkatkan retribusi daerah di Surakarta.

KESIMPULAN

Tingkat Efektivitas Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-17, menunjukkan bahwa realisasi retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo tergolong efektif.

SARAN

Berdasarkan pada hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar retribusi pasar dengan memberikan sangsi bagi wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi.
3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga perlu penyediaan infrastruktur pasar seperti bangunan pasar, dan semua fasilitas yang menunjang kebijakan retribusi pelayanan pasar demi meningkatkan PAD.
4. Para wajib retribusi diharpakan memiliki kesadaran terhadap retribusi pasar demi meningkatkan keuangan daerah dengan meningkatkan keuangan daerah pemerintah dapat memberi kanfasilitas pasar yang lebih baik..

REFERENSI

Halim, Abdul.(2004). AkuntansiSektorPublik dan AkuntansiKeuangan Daerah. Yogyakarta : YKPN.

Handoko,Tri,Asep,(2012). AnalisisPerkembanganRetribusi Pasar Daerah SebagaiSumberPembiayaanOtonomi Daerah di KabupatenPemalangTahun 2007-2011.

Kamaroellah, Agoes. (2007). AnalisisKontribusiPenerimaanRetribusi Pasar TerhadapPendapatanAsli Daerah (PAD) Pada DinasPendapatan Daerah KabupatenPemekasa,.

Kurniawan, Akbar dan Hadryan,Putra. (2010). AnalisisPenerimaanRetribusi Pasar di Kota Surakarta.Skripsitidakditerbitkan.Surakarta: ProgramStudiAkuntansiFakultasEkonomi dan BisnisUniversitasSebelasMaret.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. (2004). MetodologiPenelitian. Jakarta: Gramedia.

Patmawati, Dewi. (1996). EfektivitasPemungutanRetribusi Pasar GunaMeningkatkanPendapatanAsli Daerah. Universitas Muhammadiyah Malang.

Soelarti. (1997). *Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenerimaanRetribusi Pasar DalamUpayaPeningkatan PAD di KabupatenIndramayu.*Skripsitidakditerbitkan. Garut: Program StudiAkuntansiFakultasEkonomiUniversitasGarut.

Soeparmoko.(2002). *EkonomiPublikUntukKeuangan dan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Ofset.

Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008TentangPemerintahan Daerah

Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 TentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 TentangPertimbanganKeuanganPemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Daerah Otonomi.

Wasirin, Imam. (2000). *PerananRetribusi Pasar Terhadap PAD*.